

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004**

Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa



Disusun Oleh:

Nama : MOHAMAD YUSUP

NIM : 20010610216

Bagian : HAN

Prodi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN/HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2006**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Oleh:
MOHAMAD YUSUP
20010610216**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Created with

n nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

HALAMAN PERSETUJUAN

Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Yang diajukan Oleh :

Nama : Mohamad Yusup

NIM : 20010610216

Usul Penelitian telah di setujui oleh :

Dosen Pembimbing I


Johan Erwin, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

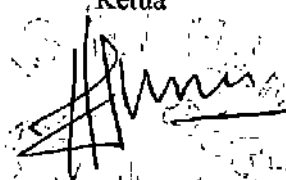

Beni Hidavat, SH

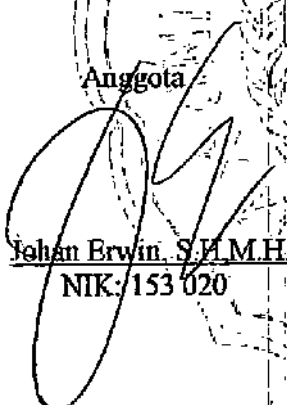
**PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1957 DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004**

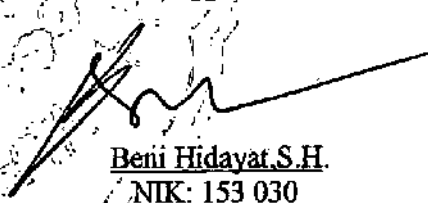
Skripsi ini

Telah di pertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 16 Juli 2007.

yang terdiri dari:

Ketua

Sunarno, S.H.M.Hum.
NIK: 153 015


Anggota

Jehan Erwin, S.H.M.H.
NIK: 153 020

Anggota

Beni Hidayat, S.H.
NIK: 153 030

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta


Dewi Nurul M, S.H, M.Hum.
NIK: 153 027

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada suatu perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya dan atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila dikemudian hari terbukti terdapat duplikasi, serta ada pihak lain yang merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab serta menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2007


MOHAMAD RIDWAN
2001 0610 216

KATA PENGANTAR

"Dan para pemuda - satu-satunya tenaga yang tersedia di tengahkeadaan sosiologis yang ditentukan pemimpin-pemimpin hipokrit dan kelompok-kelompok politik oportunistis serta situasi filosofis yang subur dengan agama dan ideologi ketidaksadaran, budaya dan pengetahuan pembodohan; satu-satunya tenaga yang tersedia ketika buruh dan tani belum seluruhnya menemukan kawan - adalah inti revolusi yang mempunyai tugas menghentikan dominasi dan hegemoni kesadaran kaum penindas atas mereka yang tertindas, sehingga rantai pembodohan-pemiskinan rakyat dapat segera dibuyarkan". (MPF Pembukaan).

Dunia masih di dominasi oleh sebuah sistem yang mengeksploitasi. Tidak hanya antar bangsa tapi juga diantara bangsa itu sendiri. Sistem yang memaksa orang untuk bekerja agar bisa tetap hidup di bawah kontrol mereka yang memiliki semua industri-industri kunci, produk hukum hanya diciptakan guna memperlanggeng proses eksploitasi.

tidak banyak tulisan yang membahas persoalan perburuhan secara yuridis dalam analisis yang kontekstual. Beberapa tulisan hanya membahas persoalan hukum perburuhan dengan hanya menitik beratkan tentang mekanisme, tata cara, atau hanya sekedar membahas tentang prosedur legal formal pembuatan Undang-Undang. Bukan dalam artian hal tersebut tidak penting karena guna lebih memperluas dan memperdalam suatu peraturan akan sangat membutuhkan pengkajian tentang hal-hal yang penulis sebut diatas, menjadi masalah ketika hal tersebut tidak diimbangi dengan suatu kajian dan analisis yang lebih mendasar terkait persoalan produk hukum yang dimunculkan, yaitu aspek keadilan. Aspek keadilan menjadi akar dari pertanyaan dasar mengapa dan untuk apa suatu produk hukum itu dimunculkan.

UU PPHI yang diundangkan pada tahun 2004 telah menjadi pranata hukum acara yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam UU PPP No 22 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan secara tegas menhendaki terwujudnya penyelesaian perselisihan

secara cepat, tepat, adil dan murah. akan tetapi didalam UU PPHI sendiri masih terdapat beberapa kelemahan yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari undang-undang tersebut yaitu penyelesaian perselisihan perburuhan secara cepat, tepat, adil dan murah. apakah faktor penyebab utamanya adalah terletak dalam politik hukumnya, keberpihakanya atau lebih kepada sebuah teknis pembuatan produk hukum yang memang dalam keadaan yang selalu berproses menuju kesempurnaan.

oleh karena penulis berupaya menganalisis dan membandingkan UU PPHI dan Undang-Undang sebelumnya, yang menurut penulis merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan demi tercapainya bentuk produk hukum perburuhan yang memiliki nilai keadilan substantif serta kepastian hukum.

Akhirnya segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena tidak ada satu kejadianpun di bumi dan di langit tanpa kehendak Nya. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Sang Revolusioner Nabi besar Muhammad SAW. Haturan terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang mendukung hingga selesaikannya skripsi ini. Kepada kedua orang tua ku bapak Subiyanto dan Ibu Suginem, serta saudara-saudaraku, mbak fatimah, mbak Khotijah, De' Marfu'ah dan De' Aisyah terimakasih buat doa dan retunya. Kepada seluruh KAWAN-KAWAN BURUH yang banyak memberikan masukan-masukan tentang penelitian ini. dan terakhir kepada dosen pembimbing Bapak Johan Erwin SH.MH. dan Bapak Beni Hidayat SH, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya.

masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena penulis sangat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Kerangka Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELISIHAN	
PERBURUHAN/HUBUNGAN INDUSTRIAL	15

1.	Jenis Konflik/ Perselisihan dan Faktor-faktor	
	Penyebab Konflik.....	16
2.	Dampak Konflik/ Perselisihan.....	19
3.	Pengelolaan Konflik/Perselisihan.....	19
B.	Konsep Hubungan Industrial.....	21
1.	Pengertian Hubungan Industrial.....	21
2.	Fungsi Para Pihak dalam Melaksanakan Hubungan Industrial.....	30
3.	Lembaga-lembaga dalam Hubungan Industrial	33
C.	Konsep Perselisihan Perburuhan/Hubungan Industrial...	42
1.	Definisi Perselisihan Perburuhan/Hubungan Industrial.....	43
2.	Pembagian Perselisihan.....	44
D.	Konsep Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan	47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 51

A. Sejarah Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial 51

1. Masa Kolonial 53

2. Masa Orde Lama 57

3. Masa Orde Baru..... 61

4. Masa Orde Reformasi..... 65

B. Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Perbu

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document details the various methods and techniques used to collect and analyze data. It covers both qualitative and quantitative approaches, highlighting the strengths and limitations of each.

3. The third part of the document focuses on the interpretation and presentation of the results. It provides guidelines for how to effectively communicate findings to different stakeholders, ensuring that the information is clear, concise, and actionable.

4. The fourth part of the document discusses the ethical considerations and potential biases that can affect the research process. It offers strategies to minimize these risks and ensure the integrity of the data and conclusions.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions drawn from the study. It also includes recommendations for future research and practical applications of the results.

6. The sixth part of the document contains a list of references and sources used throughout the study. This section is essential for providing context and credibility to the work.

7. The seventh part of the document includes an appendix with additional data, charts, and supplementary information that supports the main text but is too detailed to include in the primary report.

8. The eighth part of the document is a concluding statement that reiterates the overall purpose and significance of the research. It expresses gratitude to those who supported the project and offers a final thought on the implications of the findings.

	Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	67
	1. Penyelesaian Perselisihan di Perusahaan	68
	2. Penyelesaian Perselisihan Sukarela	72
	3. Penyelesaian Perselisihan Secara Wajib	81
	C. Kekurangan dan Kelebihan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 1957 dengan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	112
BAB IV	PENUTUP	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR TABEL		
1.1 Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.		
DAFTAR GAMBAR		
1.1 Alur Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004		